

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek/Daerah Penelitian

Gambaran umum dimaksud agar dapat melihat bagaimana gambaran variable yang di teliti, Variable yang diteliti yaitu penerimaan pajak daerah sebagai variable dependen dan variabel independen yaitu Jumlah Hotel, Inflasi, Pendapatan domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri di Kab/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2021.

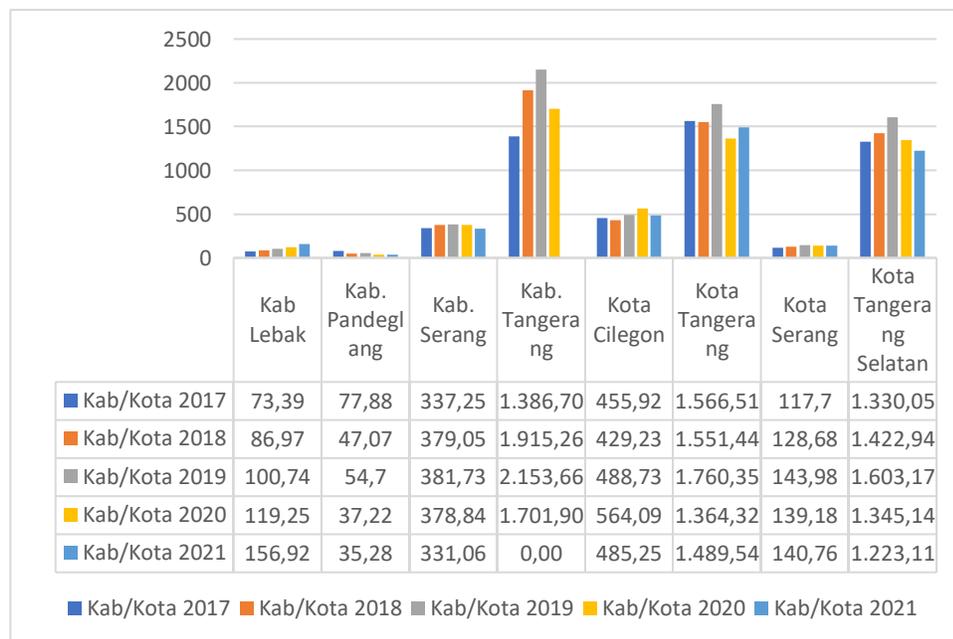
A. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sementara itu menurut (Siahaan, 2010) pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun menurut (Adisasmita, 2011) pajak daerah merupakan kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. Sementara itu menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2017 pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas maka penyusun menyimpulkan jika pajak daerah merupakan iuran yang diberbankan kepada orang atau badan yang dapat dipaksakan. Jadi pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan merupakan salah satu sumber pendapatan dalam pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Gambar 4.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

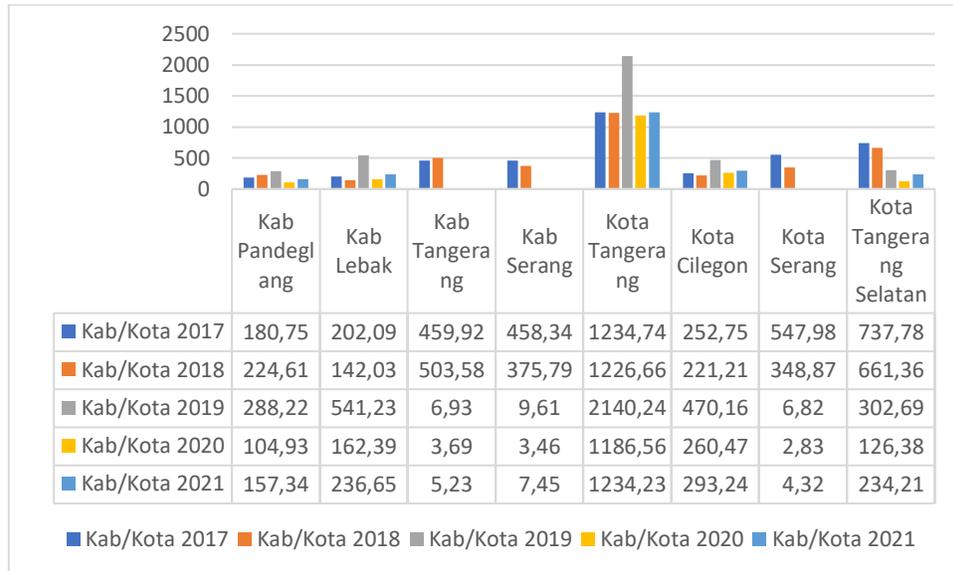
Berdasarkan Gambar 4.1 Penerimaan Pajak Daerah tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2021 penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Banten mengalami kondisi umum dimana pada Tahun tersebut mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, namun pada Tahun 2020 dan 2021 yaitu pada kondisi covid-19 Penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan sehingga perlu dianalisis.

Maka apabila wilayah Kab/Kota Provinsi Banten tidak berupaya meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan penerimaan pajak daerah tentu ini akan sangat berdampak terhadap sumber penerimaan pemerintah pusat maupun daerah di wilayah tersebut.

B. Perkembangan Jumlah Hotel

Hotel memegang peran penting dalam industri pariwisata, hal dikarenakan tidak sedikit orang enggan mengunjungi daerah wisata karena ketiadaan sarana hotel yang memadai. Hotel menurut (Bataafi, 2005) merupakan jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian ataupun seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Berkaitan dengan jumlah hotel maka dapat diartikan banyaknya jumlah akomodasi yang digunakan untuk menginap yang dikelola secara komersil. Berkaitan dengan penerimaan pajak maka sedikit banyaknya jumlah hotel dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan pajak hotel ditentukan dari besar tarif pajak yaitu 10% dari total pendapatan hotel. Jadi semakin banyak jumlah hotel maka dapat semakin banyak menarik minat masyarakat untuk menginap dan akan semakin banyak pula pajak yang disetorkan kepada pemerintah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Gambar 4. 2 Perkembangan jumlah hotel di kab/kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Berdasarkan Gambar 4.2 Jumlah tamu domestic pada usaha akomodasi menurut klasifikasi hotel dan Kab/Kota di provinsi banten dalam periode 2017-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya yang di jelaskan pada Gambar 4.2 Akan membawa dampak positif bagi penerimaan pajak di provinsi Banten. Jumlah tamu domestic pada usaha akomodasi menurut klasifikasi hotel dan Kab/Kota di provinsi banten dalam periode 2017-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya yang di jelaskan pada Tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditemukan Kab.Pandeglang,Kab Lebak, Kab Tangerang dan di susul beberapa 4 Kab/kota lainnya yang mengalami keniaikan dari Jumlah Tamu Pada setiap tahunnya, Akan membawa dampak positif bagi penerimaan pajak di provinsi Banten.

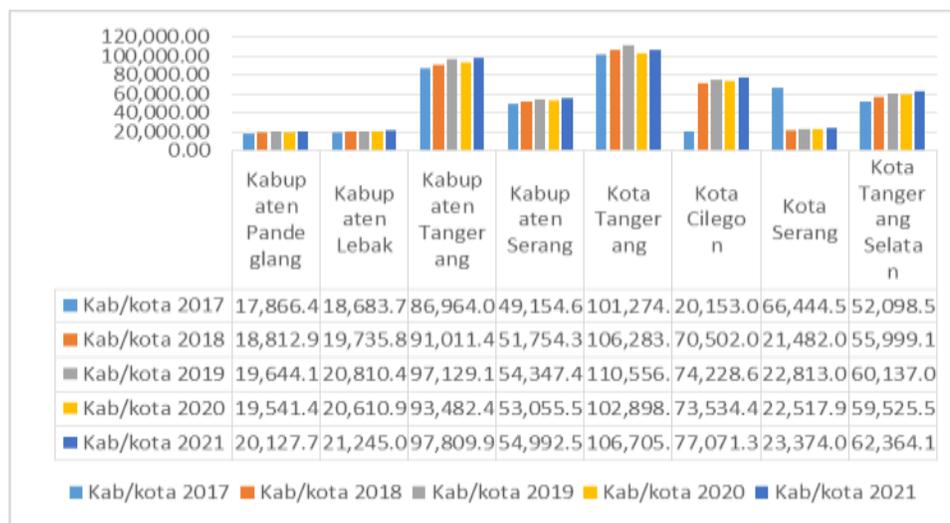
C. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto

Menurut (Todaro, 2002), produk domestik regional bruto ialah nilai total atas segenap hasil output akhir dari perekonomian di suatu wilayah (baik itu dilakukan oleh penduduk wilayah tersebut maupun penduduk dari wilayah lain yang menempati

wilayah tersebut). Besaran nilainya dilihat pada besarnya faktor produksi dan sumber daya alam daerah tersebut.

Untuk bisa mengetahui kondisi ekonomi suatu provinsi atau wilayah dalam periode tertentu salah satunya dapat ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto, baik atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi pada suatu wilayah.

Perkembangan PDRB Kab/kota di provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Gambar 4.3 Perkembangan PDRB di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2017 – 2021 (Juta Rupiah)

Pada Gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa secara garis besar perkembangan PDRB di kab/kota provinsi Banten mengalami fluktuatif di tiap tahunnya. dapat dilihat bahwa secara garis besar perkembangan produk domestik regional bruto di 8 Kab/kota Provinsi Banten pada Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan pada setiap kab/kota,

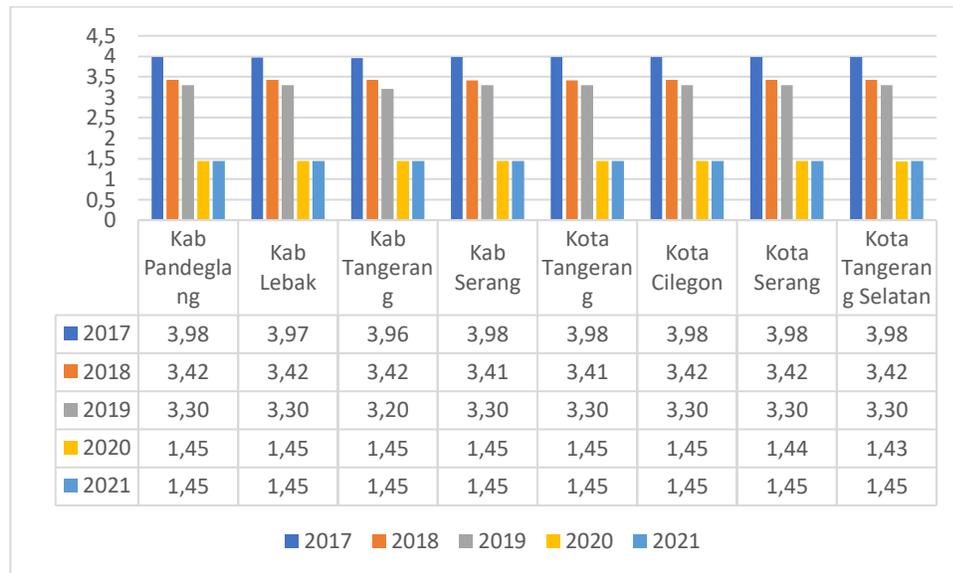
jumlah total pdrb banten di 2 tahun terakhir mengalami pada 2021 sebesar 463,690.06 juta rupiah naik 18,523,39 dari tahun sebelumnya 2020

D. Perkembangan Inflasi

Inflasi adalah kenaikan suatu harga secara umum yang terjadi terus menerus (Curatman, 2010). Inflasi menjadi masalah karena hal ini menyayatkan daya beli masyarakat suatu negara. Jika harga umum mengalami kenaikan (inflasi) tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita, maka jelas daya beli masyarakat menjadi sangat kurang.

Inflasi dapat dirumuskan sebagai kenaikan harga umum, yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang (Gilarso, 2004). Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus (Nopirin, 2016). Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan.

Perkembangan Inflasi di provinsi Banten menurut bulan dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017-2021, *Statistik Indonesia*.

Gambar 4.4 Perkembangan Inflasi di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2017 - 2021 (Persen)

Pada Gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa secara garis besar perkembangan Inflasi di kab/kota provinsi Banten mengalami kestabilan dan hanya menurun di dua kab/kota yaitu kab Tangerang dan kota Tangerang selatan. Menunjukkan bahwa di kawasan dapat dilihat secara data keseluruhan dari Tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat.

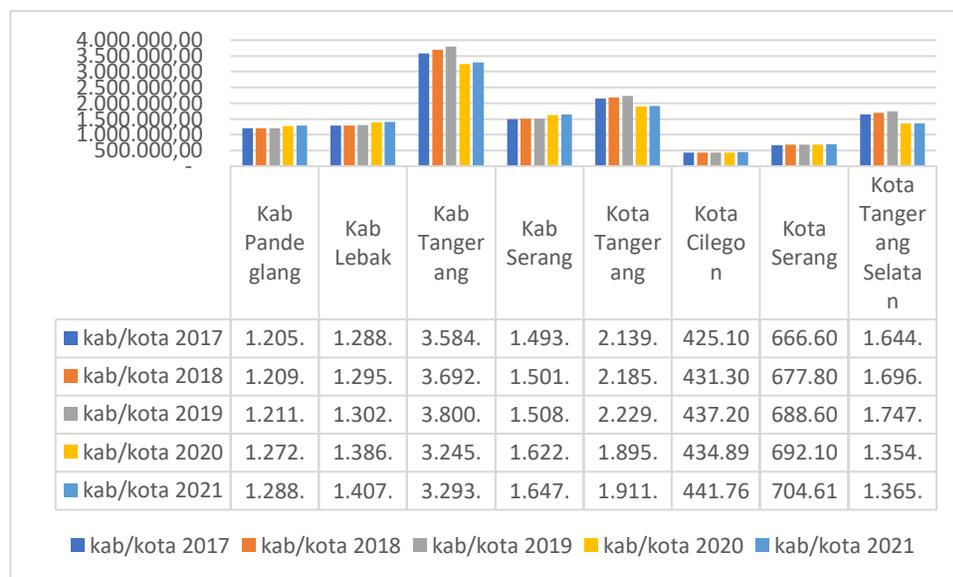
E. Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/menetap di suatu daerah/wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun. Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (seculer stagnation) dalam (Devas, 1989) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif.

Perkembangan jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah

maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak juga akan meningkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (Saputra, Sudjana dan Djudi 2014)

Perkembangan Jumlah Penduduk di kab/kota Provinsi Banten dengan rinci ditampilkan dalam gambar 4.5 sebagai berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Gambar 4.5 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2017 - 2021 (ribu jiwa)

Berdasarkan Gambar 4.5 Presentase Jumlah Penduduk terus meningkat setiap tahunnya di kab/kota provinsi banten, yang mana akan membawa dampak positif pada pendapatan daerah yaitu penerimaan pajak.

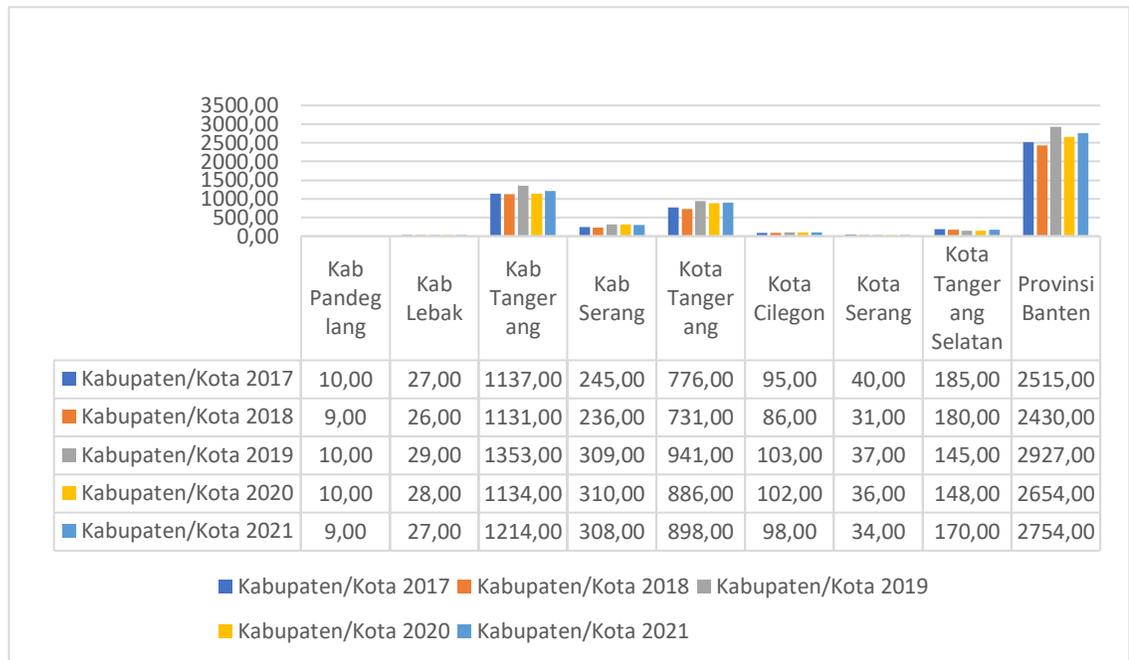
F. Perkembangan Jumlah Industri

Jumlah industri adalah jumlah seluruh industri kecil dan industri besar yang mana industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi ketika jumlah industri mulai meningkat tentu perusahaan tersebut perlu memasarkan produk

tersebut di tengah masyarakat dengan menggunakan media reklame untuk memperkenalkannya. Menurut (Sutrisno, 2002) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Penilaian tersebut sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh (Devas dkk, 1989) bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang Kabupaten/Kota) menarik pajak atas benda papan reklame di daerah. Karena pajak reklame ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat (Syuhada Sofian, 1997).

Perkembangan Jumlah Industri di kab/kota Provinsi Banten dengan rinci ditampilkan dalam gambar 4.6 sebagai berikut :

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia



Gambar 4. 6 Perkembangan jumlah Industri di kab/kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021 (Satuan)

Berdasarkan Gambar 4.6 Presentase Jumlah Industri terus meningkat setiap tahunnya di kab/kota provinsi banten, yang mana akan membawa dampak positif pada pendapatan daerah yaitu penerimaan pajak. dilihat bahwa Jumlah Industri dari kab/kota di provinsi Banten mengalami penurunan pada beberapa daerah dan mengalami kenaikan pada beberapa daerah yaitu Kota Tangerang selatan, Kota Tangerang dan Kab Tangerang, yang mana ada kenaikan jumlah industri sedang dan besar hal ini akan membawa pengaruh positif pada Penerimaan Pajak Daerah.

4.2 Hasil Uji Hipotesis

A. Hasil Uji Penelitian Model

Penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda dengan panel data yang adalah penggabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data individu (*cross section*). Penelitian ini memiliki 8 *cross section* (8 Kab/kota di Provinsi

Banten) yang berbeda pada periode waktu (*times series*) yang sama yaitu pada tahun 2017 – 2021. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antar variabel independent yaitu pajak daerah, retribusi daerah, produk domestik regional bruto, dan penanaman modal dalam negeriterhadap variabel dependen yaitu Penerimaan pajak daerah pada penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan menggunakan program statistik yaitu *Eviews* 8.0.

Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto, inflasi , Jumlah Penduduk, Jumlah Hotel dan Jumlah industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah dapat dianalisis dalam persamaan model berikut:

$$\text{TAX}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{TH}_{it} + \beta_2 \text{GRDP}_{it} + \beta_3 \text{INF}_{it} + \beta_4 \text{TP}_{it} + \beta_5 \text{TI}_{it} \quad (4.1)$$

Sebelum mengestimasi data, pengujian metode pemilihan data panel diperlukan untuk memilih atau menyesuaikan model yang akan digunakan, yaitu dengan uji sebagai berikut :

1. Uji Chow

Pada Uji chow untuk mengetahui model yang akan digunakan antara CEM atau FEM untuk mengestimasi data. Pengujian ini dilakukan dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai Prob. Cross-section F < 0,05 maka model yang dipilih adalah Fixed Effect (FEM). Sebaliknya jika Prob. Cross-section F > 0,05 maka model yang dipilih adalah Common Effect (CEM). Hasil pengujian dengan Uji Chow disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.001046	(7,27)	0.0182
Cross-section Chi-square	23.020666	7	0.0017

Sumber: Hasil pengolahan data. (Lampiran 2)

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa pada taraf signifikansi 5 persen, diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi Square* yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0182. Sehingga berdasarkan uji *Chow*, model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji Hausman

Pengujian untuk memilih model terbaik dalam mengestimasi data antara FEM dengan REM dilakukan dengan Uji *Hausman*. Hasil Uji *Hausman* dapat dilihat dengan kriteria keputusan yang sama dengan Uji *Chow* yaitu jika nilai Probabilitas $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect* (FEM). Sebaliknya jika nilai Probabilitas $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM). Berikut hasil Uji *Hausman* disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.166991	5	0.0012

Sumber: Hasil pengolahan data. (Lampiran 2)

Berdasarkan Tabel 4.2 menjelaskan bahwa pada taraf signifikansi 5 persen, diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-section Fixed* yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0012. Sehingga berdasarkan uji *Hausman*, model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Maka atas hasil yang diperoleh dari Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, diputuskan penelitian ini menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM).

B. Hasil Estimasi Model

Estimasi hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dalam penelitian ini dilakukan melalui metode pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Metode tersebut pada data panel digunakan untuk mengatasi galat pada model yang berbeda saling berkorelasi (autokorelasi).

Berikut adalah hasil estimasi regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.45343	10.18191	3.274743	0.0029
TH	0.513079	0.021687	23.65875	0.0000
TI	0.000281	0.000136	2.064221	0.0487
TP	-0.084843	0.021608	-3.926548	0.0005
INF	-0.016000	0.040633	-0.393772	0.6968
GDRP	0.197145	0.023977	8.222173	0.0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (Lampiran 2)

Dari hasil Tabel 4.3 tersebut, Persamaan 4.1 dapat diartikan sebagai berikut:

$$\text{TAX}_{it} = 30.45343 + 0,513079 \text{ TH}_{it} + 0,000281 \text{ GRDP}_{it} + -0,016000 \text{ INF}_{it} + -0,084843 \text{ TP}_{it} + 0,197145 \text{ TI}_{\epsilon it}$$

Dalam model regresi dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), hasil regresi data panel dengan program *evIEWS* 8.0 diperoleh koefisien pada tiap-tiap *cross section* untuk setiap Provinsi yang diteliti. Hal ini dapat dilihat dari nilai konstanta pada masing-masing daerah yang diteliti oleh peneliti.

Adapun nilai – nilai dari setiap konstanta sebagai berikut :

Tabel 4.4

Nilai Intersep (Konstanta) pada Kab atau Kota di Provinsi Banten

Variable	Koefisien (Ci)	Koefisien C	Ci + C
Kab lebak	19.23543	30,45343	49.688
Kab Serang	-20.98764	30,45343	9.477
Kab Tangerang	37.23543	30,45343	67.694
Kota Cilegon	40.09384	30,45343	70.553
Kota Serang	18.98752	30,45343	49.446
Kota Tangerang	50.34257	30,45343	80.342
Kota Tangerang selatan	121.0987	30,45343	151.558

Sumber : Hasil Pengolahan Data (Lampiran 2)

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel FEM didapatkan bahwa setiap provinsi memiliki nilai konstanta yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa setiap

Provinsi memiliki perbedaan faktor – faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah pada setiap kab atau kota di provinsi dalam penelitian ini. Tentunya hasil dari konstanta masing – masing Provinsi yang diteliti (C_i) dijumlahkan dengan hasil konstanta umum (C) pada model persamaan panel dengan model *Random Effect* (REM) yang menghasilkan nilai konstanta kontribusi ($C_i + C$). Berdasarkan Tabel tersebut dapat diperoleh hasil estimasi data panel dengan koefisien individu pada masing – masing *cross section* sebagai berikut:

1. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kab Lebak

$$\mathbf{TAX_{it} = 49,686 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000 INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kab Lebak sebesar 49,686 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab Lebak pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 49,686 miliar Rupiah.

2. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kab Pandeglang

$$\mathbf{TAX_{it} = 54,0959 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000 INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Provinsi Banten sebesar 54,0959 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab Pandeglang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 54,0959 miliar Rupiah.

3. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kab Serang

$$\mathbf{TAX_{it} = 9,477 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000 INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kab Serang sebesar 9,477 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab Serang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 9,477 miliar Rupiah.

4. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kab Tangerang

$$\mathbf{TAX_{it} = 67,694 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000 INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kab Tangerang sebesar 67,694 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab Tangerang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 67,694 miliar Rupiah.

5. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon

$$\mathbf{TAX_{it} = 70,553 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000 INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kota Cilegon sebesar 70,553 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan

Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 70,553 miliar Rupiah.

6. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kota Serang

$$\mathbf{TAX_{it} = 49,446 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000 INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kota Serang sebesar 49,446 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kota Serang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 49,446 miliar Rupiah.

7. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang

$$\mathbf{TAX_{it} = 80,342 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000 INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kota Tangerang sebesar 80,342 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 80,342 miliar Rupiah.

8. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan

$$\text{TAX}_{it} = 151,558 + 0,513079 \text{ TH}_{it} + 0,000281 \text{ GRDP}_{it} + 0,016000 \text{ INF}_{it} - 0,084843 \text{ TP}_{it} + 0,197145 \text{ TI}_{it} + C_{it}$$

Nilai konstanta Kota Tangerang Selatan sebesar 151,558 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 151,558 miliar Rupiah.

C. Hasil Pengujian Normalitas

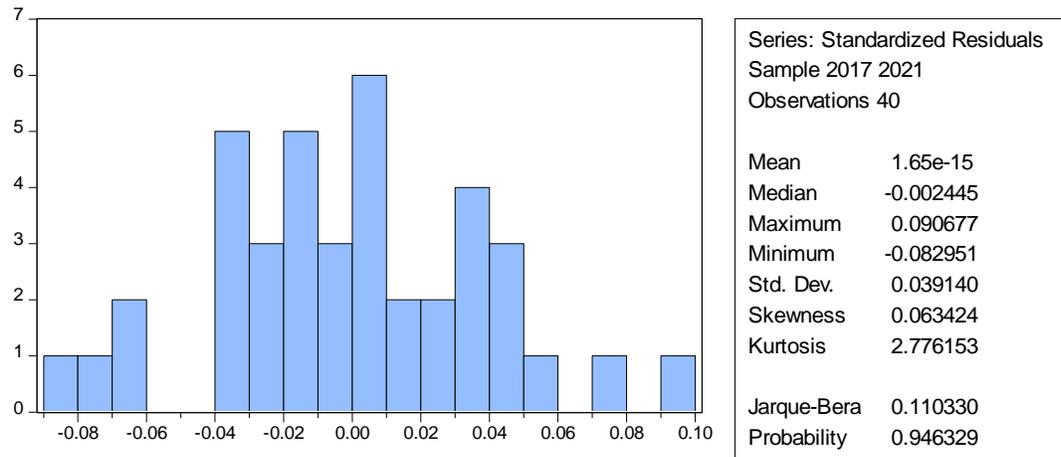
Pengujian normalitas dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dari data yang diamati apakah normal atau tidak (Gujarati & Porter, 2015:127). Dalam penelitian ini menggunakan *Jarque-Bera test (JB test)* untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dengan hipotesis :

H_0 : data tidak terdistribusi normal

H_1 : data terdistribusi normal

Kriteria pengujian adalah :

- Jika Nilai *JB test* < *Chi-Square Table* dengan (*df*) = 2, maka H_0 ditolak artinya data terdistribusi normal dan lolos uji normalitas.
- Jika nilai *JB test* > *Chi-Square Table* dengan (*df*) = 2, maka H_0 tidak ditolak artinya data tidak terdistribusi normal dan tidak lolos uji normalitas.



Sumber : Hasil Pengolahan Data (Lampiran 4)

Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.6 diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* yang dihasilkan telah memenuhi kriteria pengujian dimana apabila nilai $JB_{test} < Chi-Square$ dengan $(df) = 2$, maka data terdistribusi normal dan artinya lolos uji normalitas, Terlihat pada output didapati hasil nilai JB_{test} sebesar $0.110330 < Chi-Square$ dengan $(df) = 2$ sebesar 50.99846 Maka diketahui bahwa H_0 ditolak yang artinya data pada penelitian ini terdistribusi normal dan lolos uji normalitas.

D. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel independen. Mendeteksinya dapat dilihat dari hasil uji korelasi pada nilai matriks korelasi (*correlation matrix*). Pada uji korelasi, kita menguji multikolinearitas hanya dengan melihat hubungan secara individual antara satu variabel independen dengan satu variabel independen yang lain (Gujarati dan Porter, 2015: 408).

Uji hipotesis statistik:

H_0 : *correlation matrix* $> 0,8$, Terjadi multikolinearitas

H_1 : *correlation matrix* $\leq 0,8$, Tidak terjadi multikolinearitas

Berikut adalah tabel yang menyajikan nilai matriks korelasi untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah multikolinearitas:

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinearitas

	TH	GDRP	INF	TP	TI
TH	1.000000	-0.011801	0.081476	0.289624	0.102688
GDRP	-0.011801	1.000000	0.245115	-0.167410	0.116065
INF	0.081476	0.245115	1.000000	0.161989	0.005487
TP	0.289624	-0.167410	0.161989	1.000000	-0.166447
TI	0.102688	0.116065	0.005487	-0.166447	1.000000

Sumber: Hail Pengolahan Data (Lampiran 5)

Berdasarkan Tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa koefisien korelasi pada *Correlaion Matrix* masing-masing variabel independen adalah $< 0,80$ maka H_0 ditolak artinya tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terdapat hubungan kuat antar variabel independen.

2. Hasil Uji Autokorelasi

Hubungan suatu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain disebut sebagai autokorelasi (Gujarati & Porter, 2015:85). Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Durbin Watson* (DW) dengan ketentuan yang dikatakan terbebas dari autokorelasi (Tolak H_0) yaitu $DU \leq DW \leq 4-DU$. Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : Terdapat autokorelasi

H1 : Tidak terdapat autokorelasi

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi

Metode Panel FEM	Nilai dU	NilaidW	Nilai 4-dU	Estimasi Pengujian	Keterangan
No Weight	1,7859	1.7931	2.2141	$1,7859 \leq 1,7931 \leq 2.2141$	Tidak Terdapat Autokorelasi

Sumber: Hail Pengolahan Data.

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut, untuk mendeteksi autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson* (DW test) dengan kriteria pengujian $dU \leq dW \leq 4-dU$, harus diperoleh terlebih dahulu nilai DU (batas atas) pada tabel *Durbin-Watson* (DW) dengan jumlah observasi (n) sebesar 40 dan jumlah variabel independent (k) 5 variabel, maka didapatkan nilai du sebesar 1,7859. Pada metode panel FEM *No Weight*, hasil estimasi uji autokorelasi $1.7859 < 1,7931 > 2,2141$, maka H0 ditolak artinya tidak terdapat autokorelasi. masalah autokorelasi dapat teratasi dalam penelitian ini dan terbebas dari autokorelasi. Adapun daerah pengujian autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson* dalam penelitian sebagai berikut:

Autokorelasi Positif	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Ada Autokorelasi	Tidak Dapat Disimpulkan	Autokorelasi Negatif	
0	dL	dU	4-dU	4-dL	4
0	(1,2305)	(1,7859)	(2,2141)	(2,7695)	4

↓

(1.7931)

Gambar 4.7 Hasil Daerah Pengujian Autokorelasi Metode Durbin-Watson

3. Hasil Uji Heterokedestisitas

Dalam melakukan uji heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan perbandingan nilai *Chi-Square* hitung dengan *Chi-Square* tabel. Dimana nilai *Chi-Square* hitung didapat dari banyaknya sampel data (n) dikalikan dengan *R-Square* (Gujarati & Porter, 2015:492). Adapun hipotesis uji heterokedastisitas yaitu :

H0 : tidak terjadi heterokedastisitas

H1 : terjadi heterokedastisitas

Untuk mendeteksi apakah terjadi heterokedastisitas dalam model, digunakan kriteria berdasarkan indikator output *views* sebagai berikut:

- Jika *Chi-Square* hitung < *Chi-Square* tabel, maka H0 ditolak artinya tidak terjadi heterokedastisitas.
- Jika *Chi-Square* hitung > *Chi-Square* tabel, maka H0 tidak ditolak artinya terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.7

Hasil Estimasi Uji White – Heterokedastisitas

Jumlah Data (n)	R-Squared	Jumlah Variabel (k)	Chi-Square Hitung (nxR-Squared)	Chi-Squared Table	Keterangan
40	0,967113	5	38,68452	49.8018495	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan data Panel

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa nilai *Chi-Square* hitung sebesar (38,68425) < *Chi-Square* tabel sebesar (49.8018495) maka H0 ditolak artinya tidak terjadi heterokedastisitas dan lolos uji heterokedastisitas.

4. Hasil Pengujian Hipotesis Statistik

Pengujian hipotesis statistik merupakan pengujian terhadap hipotesis penelitian yang akan menghasilkan suatu keputusan dalam menolak atau tidak menolak hipotesis penelitian. Jika menolak hipotesis nol atau H0 maka penelitian yang dilakukan secara statistik keputusannya adalah berpengaruh dan jika tidak menolak hipotesis nol atau H0 maka keputusannya hasil penelitian tersebut secara statistik tidak berpengaruh.

5. Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam analisis regresi pengaruh Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Perimaan Pajak Daerah secara parsial di Kab/Kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Untuk tarafsignifikansi $1-\alpha = 95\%$ (0,95), apabila probabilitas kurang dari α maka signifikan. Dengan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu hipotesis statistik 2 arah maka taraf signifikansi

menjadi $1-\alpha = 97,5\% \text{ } (0,975)$. Dengan probabilitas $\alpha = 0,025$ dan derajat kebebasan $(df) = n-k = 40-5 = 35$ $t_{tabel} = 2.03010$ atau $-t_{tabel} = - 2.03010$

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Uji T-Statistik

Variabel	T Hitung	T Tabel	Prob.	Hasil Pengujian
Jumlah Hotel	23,65875	2,03010	0.6968	Tolak H_0 , signifikan
Produk Domesti Regional Bruto	8,222173	2,03010	0,0000	Tolak H_0 , signifikan
Inflasi	-0,393772	2,03010	0,0005	Tidak tolak H_0 , tidak signifikan
Jumlah Penduduk	-3.926548	2,03010	0,0000	Tidak tolak H_0 , tidak signifikan
Jumlah Industri	2,064221	2,03010	0,0487	Tolak H_0 , signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan data.

Berdasarkan Tabel 4.7 Dapat diuraikan hasil pengujian hipotesis statistik t (Parsial) sebagai berikut :

Pengambilan Keputusan : Jumlah Hotel

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 . Dan apabila $Prob. < (5\% = 0,05)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi nilai t_{hitung} Jumlah Hotel lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $23,65875 > 2,03010$ dengan nilai $Prob. (0.6968) < (0,05)$, maka H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh signifikan dari Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten.

Pengambilan Keputusan : Produk Domestik Regional Bruto

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 . Dan apabila $Prob. < (5\% = 0,05)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi nilai t_{hitung} Produk Domestik Regional Bruto lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $8,222173 > 2,03010$ dengan nilai $Prob. (0,0000) > (0,05)$, maka H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh signifikan dari Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten.

Pengambilan Keputusan : Inflasi

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 . Dan apabila $Prob. < (5\% = 0,05)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi nilai t_{hitung} Inflasi lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar $-0,393772 > 2,03010$ dengan nilai $Prob. (0,0005) < (0,05)$, maka H_0 Tidak ditolak. Artinya Tidak terdapat pengaruh signifikan dari Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten.

Pengambilan Keputusan : Jumlah Penduduk

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 . Dan apabila $Prob. < (5\% = 0,05)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi nilai t_{hitung} Jumlah Penduduk lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar $-3,926548 > 2,03010$ dengan nilai $Prob. (0,0000) < (0,05)$, maka H_0 Tidak ditolak artinya Tidak terdapat pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten.

Pengambilan Keputusan : Jumlah Industri

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 . Dan apabila $Prob. < (5\% = 0,05)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi nilai t_{hitung} Jumlah Industri lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2,064221 > 2,03010$ dengan

nilai Prob. (0,0487) < (0,05), maka H0 ditolak artinya terdapat pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten. Adapun hasil pengelolaan data uji hepotesis statistik simultan (uji F) sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji F-Statistik

F-hitung	F-tabel	Prob	Hasil Pengujian
66.16701	2.33582	0,00000	Tolak Ho, Signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan data

Jumlah Hotel, produk domestik regional bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yang menggunakan $\alpha = 5\%$ (0,05) dengan degree of freedom for mumerator (dfn = k-1 = 5-1 = 4) dan degree of freedom for mumerator (dfd = n-k = 40-5 = 35) maka diperoleh Ftabel sebesar 2,33582. Jika Fhitung > Ftabel maka tolak H0, dari hasil regresi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, produk domestik regional bruto, dan penanaman modal dalam negeri terhadap pendapatan asli daerah keuangan diperoleh Fstatistik atau F hitung 0,00000. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh Jumlah Hotel, produk domestik regional bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten dengan asumsi variabel lain dianggap tetap ceteris paribus.

6. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menginformasikan seberapa baik regresi dalam model menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Jika nilai R2 semakin mendekati satu mengartikan variabel-variabel independent memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen. Berikut adalah besarnya koefisien determinasi berdasarkan hasil pengolahan data:

Tabel 4.10 Hasil Uji R²

R-squared	R² X 100
0,967113	97,71%

Sumber : Hasil Pengolahan data

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tersebut diperoleh nilai Rsquared (R²) sebesar 0,967113 atau 96,71 persen. Hal ini memberi arti bahwa variabel independen (produk domestik regional bruto, inflasi, jumlah penduduk, jumlah hotel dan jumlah industri) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Daerah sebesar 0,967113 pada Kab/kota provinsi di Banten yaitu Kota Tangerang, Kab Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, serta sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

4.3 Pembahasan

4.1 Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Variabel Jumlah Hotel menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hasil tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $23,65875 > (t_{\text{tabel}} = 2,03010)$, nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ sebesar $0.0000 < 0,05$, dan nilai koefisien sebesar 0.513079, artinya jika Jumlah Hotel meningkat 1 unit maka pendapatanasli daerah di Provinsi Indonesia bagian timur akan naik sebesar 0.513079 persen, Hal tersebut mengartikan bahwa ketika Jumlah Hotel meningkat maka akan berdampak pada kenaikan Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten. Dalam Hal ini Faktor yang dapat berhubungan dengan peningkatkan pajak daerah adalah jumlah hotel.

Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Kota Yogyakarta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel maka dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah di Jawa Timur. Jika jumlah hotel bertambah dengan sendirinya akan dapat meningkatkan penerimaan Pajak daerah melalui pajak hotel (Aliandi dan Handayani, 2013). Lalu hal ini sejalan dengan jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Sumatera Barat Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh jumlah hotel, jumlah restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran serta dampaknya pada pendapatan asli daerah di Sumatera Barat (Sanjaya & Wijaya, 2020).

4.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Variabel Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hasil tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $8,222173 > (t_{\text{tabel}} = 2,03010)$, nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ sebesar $0,0000 > 0,05$, dan nilai koefisien sebesar 0.197145 , artinya jika Produk Domestik Regional Bruto meningkat 1 juta rupiah maka pendapatan Penerimaan Pajak di Kab/kota Provinsi Banten akan naik sebesar 0.197145 persen, artinya ketika Produk Domestik Regional Bruto meningkat maka akan berdampak pada peningkatan Penerimaan Pajak daerah.

Hal ini terjadi karena Produk Domestik Regional Bruto di Kab/kota Provinsi Banten lebih besar mempengaruhi Penerimaan Pajak.. Hal ini sejalan dengan penelitian yaitu PDRB berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap penerimaan Pajak Daerah provinsi (Susila & Pradhani, 2022).

Peningkatan PDRB tidak lepas dari dampak meningkatnya aktivitas ekonomi. Seiring dengan meningkatnya standar hidup masyarakat maka golongan masyarakat

yang berpenghasilan tinggi akan semakin meningkat juga, sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan sektor-sektor pajak daerah ada dalam PDRB (Shiska dan Nizaruddin: 2009).

4.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Variabel Inflasi menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hasil tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $-0,393772 < (t_{\text{tabel}} = 2,03010)$, nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ sebesar $0,6968 > 0,05$, dan nilai koefisien sebesar $-0,016000$, artinya jika Inflasi meningkat 1 persen maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten akan menurun sebesar $-0,016000$ persen, artinya ketika Inflasi meningkat maka akan berdampak pada penurunan Penerimaan Pajak Daerah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan PPN (Pajak pertambahan nilai) pada penerimaan pajak daerah hal ini menjelaskan konsumsi masyarakat akan berkurang karena inflasi yang meningkat dan dampaknya pendapatan riil masyarakat akan menurun karena kenaikan pendapatan tidak akan secepat kenaikan harga. Adanya inflasi kemungkinan dapat menurunkan jumlah produk yang akan dibeli karena harga produk yang mengalami kenaikan sehingga penerima PPN tidak mengalami kenaikan yang signifikan (Junianto et al., 2020).

4.4 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Variabel Jumlah Penduduk menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hasil tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $-3,926548 > (t_{\text{tabel}} = 2,03010)$, nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ sebesar $0,0005 < 0,05$, dan nilai koefisien sebesar $-0,084843$,

artinya jika Jumlah Penduduk meningkat 1 orang maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten akan naik sebesar -0.084843 persen artinya ketika Jumlah Penduduk meningkat maka tidak berdampak pada penerimaan pajak daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon, yang artinya pertumbuhan jumlah penduduk tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, mungkin hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk Kota Tomohon yang belum terdata rapih pada DPPKAD sehingga pajak yang terdata belum mencapai target yang optimal (Mongdong et al., 2018).

4.5 Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Variabel Jumlah Industri menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hasil tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $2,064221 > (t_{\text{tabel}} = 2,03010)$, nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ sebesar $0,0487 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0.000281 , artinya jika Jumlah Industri meningkat 1 maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten akan naik sebesar 0.000281 persen artinya ketika Jumlah Industri meningkat maka akan berdampak pada kenaikan penerimaan pajak daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Jumlah industri adalah jumlah unit usaha industri besar. Jumlah industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi ketika jumlah industri meningkat tentu untuk bisa memasarkan produk tersebut di tengah masyarakat perlu menggunakan media reklame untuk memperkenalkannya. (Miftahol Arifin, 2018) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

4.6 Pengaruh Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah

Penduduk dan Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Simultan

Variable Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri menunjukkan bahwa terhadap Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021. Hal ini dibuktikan dengan hasil regresi yang didapat dimana nilai Fhitung adalah 66,16701 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,33582 serta nilai probabilitas 0,0000 kurang dari tingkat kepercayaan sebesar 0,05.

Nilai koefisien determinan pada penelitian ini sebesar 0,967113 atau dikalikan dengan 100 maka sebesar 97,71 (persen). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di 8 Kab /kota Provinsi Banten pada tahun 2017-2021 dipengaruhi oleh Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inlasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sebesar 97,71 (persen). Sedangkan sisanya sebesar 2,29 (persen) dipengaruhi oleh variable lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Jadi secara simultan variable jumlah hotel, produk domestik regional bruto, inflasi, jumlah penduduk, jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di kab/kota provinsi banten tahun 2017-2021.